

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA FIKIR DAN PARADIGMA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Tinjauan Historis

Secara etimologi konsep tinjauan pustaka terdiri dari dua kata yakni tinjauan dan historis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia “Tinjauan berasal dari kata tinjau yang bearti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk menarik kesimpulan”. Sedangkan kata Historis berasal dari bahasa Yunani “Istoria” yang bearti ilmu yang biasanya diperuntukan bagi penelaah mengenai gejala-gejala (terutama hal ihwal manusia) dalam urutan kronologis.

Menurut definisi yang paling umum, kata History kini bearti “ masa lampau umat manusia”. Sedangkan Sejarah menurut bahasa Jerman adalah geschichte yang berasal dari geschehen yang bearti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata Historis dikenal dengan kata sejarah. Adapun pengertian Historis atau sejarah adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran. (Roeslan Abdulgani, dalam H. Rustam E. Tamburaka. 1999 : 12)

Dengan demikian tinjauan historis memiliki pengertian sebagai suatu bentuk penyelidikan ataupun penelitian terhadap gejala peristiwa masa lampau manusia

baik individu maupun kelompok beserta lingkungannya yang ditulis secara ilmiah, kritis dan sistematis meliputi urutan fakta dan masa kejadian peristiwa yang telah berlalu itu (kronologis) dengan tafsiran dan penjelasan yang mendukung serta memberikan pengertian terhadap gejala peristiwa tersebut.

2. Konsep Peran Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-prilaku yang diharapkan dari memegang kedudukan tertentu. (Hendropuspito : 105)

Pada tanggal 22 Agustus 1945, terbentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dinyatakan dalam pidato Presiden, yang tugasnya menjaga keamanan umum di daerah-daerah dibawah koordinasi Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah dan penolong korban perang. Pidato Presiden itu mendapat sambutan dua macam dari pemuda-pemudi Indonesia, dikalangan pemuda Indonesia terutama mereka yang pernah menjadi anggota Pembela Tanah Air (PETA), Heiho, dan Koninklijk Nederland Indisch Leger (KNIL) memutuskan untuk memasuki BKR dan memanfaatkannya semaksimal mungkin sebagai wahana perjuangan. (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993; 108)

3. Konsep Tentang BKR di Bidang Politik

Badan Keamanan rakyat (BKR) berjuang lebih baik dalam lapangan politik atau dengan kata lain mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan revolusi maupun strategi dalam pertempuran dengan negara yang tak ingin mengakui kedaulatan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah merdeka pada

tanggal 17 Agustus 1945. Sebagaimana dalam penyusunan suatu kekuatan pertahanan keamanan negara, maka dibentuklah BKR, sesudahnya keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 22 Agustus BKR adalah suatu Badan Keamanan Rakyat yang bertujuan untuk melindungi rakyatnya. Adapun usaha yang dilakukan BKR adalah mengadakan perjuangan terhadap tanah air, di luar BKR timbullah badan-badan perjuangan rakyat yang juga ikut berjuang bersama-sama. Namun badan-badan perjuangan ini menyatukan dirinya dalam suatu komite van aksi, adapun badan-badan itu adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (Bara) dan Barisan Buruh Indonesia (BBI), hal ini sebagaimana dikemukakan oleh (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993; 108) sebagai berikut :

Mereka membentuk badan-badan perjuangan yang kemudian menyatakan diri dalam sebuah Komite van aksi yang bermarkas di Jalan Menteng 31 di bawah pimpinan Adam Malik, Sukarni, Khairil Saleh, Maruto Nitimiharjo, dan lain-lain. Badan-badan yang bernaung di bawah Komite Van Aksi adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), dan Barisan Buruh Indonesia (BBI). (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993; 108)

Berdasarkan konsepsi diatas, para pemuda Indonesia membentuk suatu organisasi yang bermarkas di Jalan Menteng 31. Adapun badan-badan perjuangan itu yang kesemuanya tidak puas dengan adanya Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan rakyat saja. Sedang para pemuda menginginkan dibentuknya sebuah tentara nasional Indonesia. Sebagai tanda ketidakpuasan dari para pemuda maka mereka membentuk badan-badan perjuangan yang juga sangat berjasa dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya

(Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993; 106)

mengemukakan kembali bahwa :

Di Bali, para pemuda telah membentuk beberapa organisasi pemuda seperti AMI, Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada akhir bulan Agustus. Mereka berusaha menegakkan Republik Indonesia melalui perundingan tetapi mendapat hambatan dari pihak Jepang. (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993; 106)

Para pemuda membentuk organisasi-organisasi yang bertujuan supaya pemerintah Kolonial Jepang mau mengakui serta mengembalikan kedaulatan Republik Indonesia secara utuh, dan tidak dikembalikan kepada pemerintah kolonial Belanda, meskipun Jepang negara yang kalah dalam peperangan dengan sekutu. Adapun usaha yang dilakukan para pemuda Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya agar dikembalikan pada bangsa kita dengan mengadakan pertemuan dengan Jepang dengan melakukan perebutan persenjataan dan kekuasaan dari pemerintah Jepang di mana-mana. Hal ini sebagai mana dikemukakan lagi oleh (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993; 121) menyatakan sebagai berikut :

BKR dan badan-badan perjuangan yang di bentuk oleh para pemuda itulah yang mempelopori perebutan kekuasaan dan perebutan persenjataan dari tangan Jepang. Dengan demikian pertempuran-pertempuran yang pertama terjadi melawan pihak Jepang. Pemimpin tentara keenam belas Jepang di Jawa tidak mau mengakui adanya Republik Indonesia, karena mereka terikat komitmen untuk sebagai pihak yang kalah perang memelihara status gua sejak tanggal 15 Agustus 1945 tak kala pucuk pimpinan negara mereka menyerah pada serikat. (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993; 121)

Para pemuda pejuang dan yang tergabung dalam BKR telah mengadakan perebutan kekuasaan terhadap Jepang, karena pemerintah Jepang yang berkuasa

di Jawa khususnya tidak mau mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamsikan pada tanggal 17 Agustus 1945, serta untuk memperoleh persenjataan dengan melucuti tentara Jepang yang telah kalah dan senjatanya sebagai modal dalam melawan bangsa Belanda yang membonceng sekutu. Hal ini sesuai pernyataan (M. Yamin. 1950: 18) mengemukakan sebagai berikut :

Kelakuan Jepang adalah perampasan kekuasaan dengan jalan yang tidak sah dan tidak jujur, serta kelakuan Belanda dan Inggris adalah peperangan-peperangan yang alim, perang kemerdekaan Indonesia adalah perang pembelaan kemerdekaan yang menjadi hak mutlak sebagai bangsa. (M. Yamin. 1950: 18)

Tindakan-tindakan pemerintah Jepang terhadap Indonesia adalah perampasan kekuasaan dengan jalan melakukan peperangan dengan pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan karena Jepang tidak mau mengakui adanya bangsa Indonesia. Dilain pihak Belanda merupakan salah satu bangsa yang akan menanamkan pengaruhnya di Indonesia yang dianggap masih wilyah kekusaannya. Kemudian menurut (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993; 101) mengemukakan sebagai berikut :

Sesudah proklamasi terjadilah pertempuran dan bentorakan-bentrokan antara pemuda Indonesia melawan aparat kamanan Jepang. Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan guna menegakkan kedaulatan Republik Indonesia serta untuk memperoleh peralatan senjata. (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993; 101)

Proklamasi kemerdekaan yang diperoleh pada tanggal 17 Agustus 1945. Telah tidak sedikit memakan korban harta bahkan nyawa para pejuang-pejuang bangsa Indonesia yang berusaha memperoleh pengakuan atas status kemerdekaannya secara penuh dari bangsa baik itu Jepang maupun Belanda dan bangsa lain.

Dengan demikian proklamasi kemerdekaan memerlukan pengisian dan pertahanan yang kuat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Muhammad Yamin: 1950: 31) menyatakan sebagai berikut ;

Revolusi Indonesia yang dimulai dengan Proklamasi itu menetapkan dengan membela kemerdekaan negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia yang diperjuangkan supaya mendapat keanggotaan penuh sempurna dalam lingkungan segala bangsa merdeka sedunia. (Muhammad Yamin. 1950: 31)

Bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan para pemuda dan pejuang yang lain adalah untuk memperoleh kedaulatan kemerdekaan dan supaya bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan dan kedaulatan dari bangsa-bangsa di dunia terutama bangsa Belanda yang pernah menjajah di Indonesia. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka seperti bangsa-bangsa didunia lainnya.

Dengan demikian penantian yang dinantikan itu akan berwujud melalui perjuangan yang dilakukan oleh Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan pemuda pejuang Indonesia lainnya. Jadi dengan ini jelaslah bahwa pengaruh Badan Keamanan Rakyat (BKR) di bidang politik merupakan langkah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan untuk memperoleh kemerdekaan bangsa Indonesia.

4. Konsep Tentang Peran BKR Di Bidang Militer

Badan Keamanan Rakyat berjuang dalam bidang militer. Dalam perjuangan Badan Keamanan Rakyat mengadakan perlawanan atau insiden-insiden melawan

Jepang dalam usahanya merebut senjata dari tangan Jepang, sebab Jepang tidak mau mengakui adanya kemerdekaan bangsa Indonesia dengan mengadakan perebutan kekuasaan dan persenjataan Jepang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh (Nugroho Notosusanto. 1990 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993; 104) sebagai berikut :

Di Semarang setelah ada pemuda yang berhasil merebut kekuasaan, terjadi perbenturan yang dasyat antara para pemuda Indonesia melawan Jepang karena pihak Jepang merasa terancam oleh pemuda yang berusaha merebut senjata mereka. (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993; 104)

Dari konsepsi diatas dapat diambil pengertian bahwa setelah bangsa Indonesia memproklamasikan diri, bangsa Jepang tidak mau mengakui akan kekuasaan Republik Indonesia walaupun sebenarnya Jepang telah mengalami kekalahan dengan serikat. Dengan demikian maka para pemuda harus memaksa pemerintah Jepang agar mau mengakui kemerdekaan itu, dengan cara melakukan perebutan kekuasaan dan persenjataan Jepang. Sehingga secara langsung terjadi insiden-insiden pertempuran-pertempuran antara para pemuda dan bangsa Jepang. Sementara itu Jepang harus menjaga status gua, dilain pihak pemuda Indonesia ingin mempertahankan kemerdekaan dan memperoleh pengakuan. (A.H. Nasution. 1977; 3) mengemukakan sebagai berikut :

Sejak timbulnya pertengkaran-pertengkaran sengit antara sekutu di satu pihak dan Belanda di lain pihak. Belanda ingin segera menengakkan kembali kekuasaan kolonialnya di Indonesia, sedangkan pihak sekutu berhati-hati dalam menghadapi persoalan Indonesia yang penuh dengan kesulitan. (A.H. Nasution. 1977; 3)

Bangsa Belanda dengan segala cara akan kembali ke Indonesia untuk menanankan pengaruh kolonial dan ia masih menganggap bangsa Indonesia adalah merupakan dari wilayahnya. Perlu pula diketahui bahwa bangsa Indonesia telah adanya perubahan yaitu telah memproklamasikan kemerdekaannya, maka menimbulkan perselisihan antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia. Dengan demikian menimbulkan amarah di kalangan pemuda-pemuda Indonesia atas ulah Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia, kemudian pertempuran tidak dapat dielakkan lagi antara pemuda Indonesia melawan Belanda. Hal ini sesuai pernyataan (M. Yamin. 1950: 27) yang mengemukakan sebagai berikut :

Maka sangatlah sayang karena pihak agresi Belanda dan Inggris pada permulaan revolusi Indonesia telah berusaha hendak menidurkan pergerakan kemerdekaan Indonesia agar menjalankan muslihat hendak mengembalikan keadaan revolusi dan kedaulatan jajahan seperti sebelum Perang dunia II. (M. Yamin. 1950: 27)

Pemerintah penjajah sesuai yang telah direncanakan Belanda sebelumnya. Pemerinta Belanda tetap ingin menjadikan Indonesia sebagai jajahan, serta tidak mau mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh walau sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini menimbulkan sikap anti penjajah terhadap bangsa terutama pemuda-pemudanya dan rakyat Indonesia serta berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda guna untuk mempertahankan dan menegakkan serta memperoleh pengakuan bekas kaum penjajah yaitu bangsa Belanda. Sehubungan dengan hal ini (A.H. Nasutio. 1977; 249) mengemukakan sebagai berikut :

Oleh karena itu barisan rakyat mengambil taktik tidak memberikan kesempatan lagi kepada serdadu-serdadu NICA yang terang-terangan hendak menjajah lagi itu untuk menyesuaikan diri dengan iklim di daerah timur ini guna nanti mereka mengadakan serangan yang lebih hebat. (A.H. Nasutio. 1977; 249)

Pemerintah Belanda tetap ingin menjadikan Indonesia sebagai negara jajahan, hal ini dilakukan oleh pemerintah Belanda yang secara terang-terangan mendaratkan tentaranya di beberapa daerah, serta tidak mau mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan Belanda melihat serta akan menyesuaikan diri dengan keadaan Indonesia yang sudah merdeka dan akan mengadakan serangan yang lebih hebat lagi, bila rakyat Indonesia tidak bersungguh-sungguh dalam perjuangannya mempertahankan kemerdekaan bangsa atas kedaulatannya. Sehubungan dengan hal ini (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, 1993; 123) mengemukakan bahwa :

Kenyataan adalah lain di kota-kota lain yang didatangi oleh pasukan serikat lalu terjadilah insiden-insiden bahkan pertempuran-pertempuran dengan pihak Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan pasukan serikat tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia. (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, 1993; 123)

Kedatangan pasukan serikat yang bertujuan untuk melucuti tentara Jepang yang kalah itu ternyata digoncengi oleh tentara Belanda. Oleh karena itu pemerintah Indonesia sangat marah, terutama kaum pemuda – pemudanya untuk segera melakukan perlawanan, karena menurut mereka pasukan serikat itu tidak menghormati adanya pemerintah Indonesia dan tidak mau mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia, maka pemuda-pemuda melakukan perlawanan dimana-mana untuk mendapatkan pengakuan dari serikat. Terutama Belanda dan masyarakat dunia Internasional pada umumnya dan untuk

mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945. Hal ini dikemukakan (A.H Nasution. 1977; 91) yang menyatakan sebagai berikut :

Pertempuran – pertempuran Bandung, Semarang, Surabaya, Banyumas, Sukarta, Magelang, Yogyakarta dan sebagainya adalah lebih tegas daripada peristiwa dipusat dimana serentak rakyat secara massal bergerak merebut kekuasaan sipil dan militer. (A.H Nasution. 1977; 91)

perlawanan atau pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Indonesia dan penguasa-penguasa di daerah bersama-sama serentak melakukan perebutan kekuasaan serta memperoleh pengakuan dari penjajah baik dari bangsa Belanda maupun Jepang. Biasanya pertempuran-pertempuran di daerah lebih dasyat bila dibandingkan dengan di pusat. Perebutan kekuasaan sipil dan militer di daerah dengan menyerahkan tenaga rakyat yang banyak. Hal ini membuat semakin besarnya semangat bangsa Indonesia terutama para pemuda-pemudanya dalam usahanya mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi dengan demikian maka perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang dan pemuda-pemuda serta BKR dapat mewujudkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan dari negara bekas penjajah yaitu Belanda dan Jepang serta dunia Internasional.

5. Konsep ketahanan nasional

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan serta

gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, langsung atau tidak langsung membahayakan integritas identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan pembangunan nasional.

Ketahanan Nasional meliputi :

1. Ketahanan di bidang ideologi yang berakar pada kepribadian bangsa sendiri.
2. Ketahanan di bidang politik yang mutlak diperlukan untuk membina stabilitas politik dengan mengembangkan kehidupan demokratis yang memadukan kebebasan aktif dan tanggung jawab.
3. Ketahanan di bidang ekonomi yang harus diusahakan dengan melaksanakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata.
4. Ketahanan di bidang sosial budaya dengan mengembangkan rasa senasib sepenanggungan serta keselarasan keserasian dan keseimbangan sosial.
5. Ketahanan di bidang pertahanan keamanan, dengan memupuk rasa kesadaran dan tanggung jawab seluruh bangsa atas kedaulatan dan keamanan negara dan bangsa dengan kekuatan bersenjata sebagai pelopor. (Tontowi, 2008 : 76)

Menurut Winarno dalam bukunya Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan terdapat tiga prespektif atau sudut pandang terhadap konsepsi Ketahanan Nasional. Ketiga prespektif tersebut sebagai berikut :

1. Ketahanan Nasional sebagai kondisi. Prespektif ini melihat Ketahanan Nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. Keadaan atau kondisi ideal demikian memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan.
2. Ketahanan Nasional sebagai sebuah pendekatan, metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. Sebagai suatu pendekatan Ketahanan Nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek/isi, baik pada saat pembangunan maupun pemecahan masalah kehidupan.
3. Ketahanan Nasional sebagai doktrin. Ketahanan Nasional merupakan salah satu konsepsi Khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara. Sebagai doktrin dasar nasional, konsep Ketahanan Nasional dimaksukan dalam GBHN agar setiap orang, masyarakat, dan penyelenggara menerima dan menjalankannya. (Winarno 2007 : 170-171)

Kemudian Menurut Muhamad Erwin bukunya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan ketahanan nasional adalah sebagai berikut :

- Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Pada prinsipnya pelaksanaan dan pengembangan ketahanan nasional haruslah diselenggarakan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan baik secara lahiriah maupun bathiniah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi

- Asas Utuh Menyeluruh dan Terpadu

Pada prinsipnya dalam penyelenggaraan ketahanan nasional haruslah dilaksanakan dengan sungguh – sungguh dan meliputi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara seimbang, serasi, sistematis, dan harmonis.

- Asas Kekeluargaan

Pada prinsipnya dalam penyelenggaraan ketahanan nasional haruslah didasari dengan suasana kebersamaan, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab.

- Asas Mawas Diri

Bahwa dalam berhadapan dengan lingkungan nasional ataupun internasional, penyelenggaran ketahanan nasional pada dasarnya haruslah didasari dengan jiwa yang mawas diri terutama dalam menghadapi kapitalisme, globalisasi, dan terorisme. (Muhamad Erwin : 211)

Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Kaelan dan Achmad Zubaidi terdapat beberapa Konsepsi Ketahanan Nasional yang melatar belakangi suatu bangsa sebagai berikut :

- Kekuatan apapun yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar.
- Ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan (regular) dan stabilitas, yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan (the stability idea of changes). (H.Kaelan & H.Achmad Zubaidi : 147)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep ketahanan nasional adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir. Kondisi Ketahanan nasional pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, gangguan, ancaman dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Sedangkan militer ketahanan nasional adalah kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman dari dalam

maupun dari luar serta memupuk rasa kesadaran dan tanggung jawab seluruh bangsa atas kedaulatan dan keamanan negara dan bangsa dengan kekuatan bersenjata. Oleh karena itu, Badan Keamanan Rakyat (BKR) bertugas menegakan Republik Indonesia agar tidak dapat dijajah kembali oleh bangsa asing.

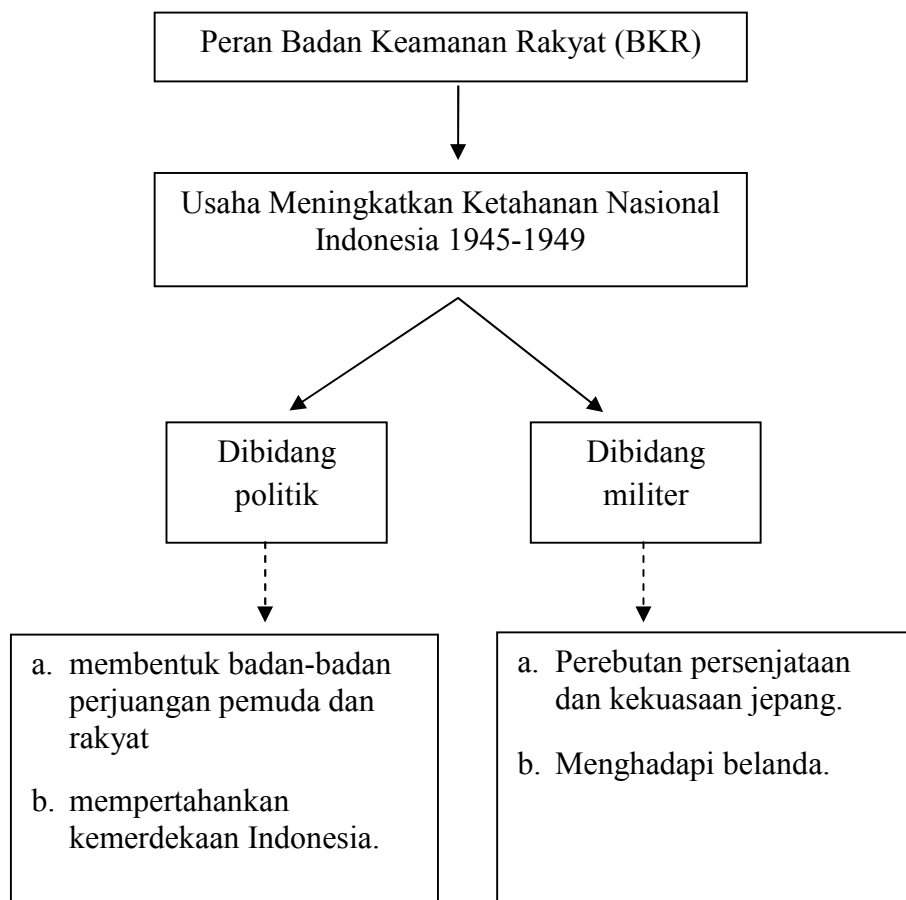
B. Kerangka Pikir

Setelah terbentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dinyatakan dalam pidato Presiden, yang tugasnya menjaga keamanan umum di daerah-daerah dibawah koordinasi Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah dan penolong korban perang. Pidato Presiden itu mendapat sambutan dua macam dari pemuda-pemudi Indonesia, dikalangan pemuda Indonesia terutama mereka yang pernah menjadi anggota Pembela Tanah Air (PETA), Heiho, dan Koninklijk Nederland Indisch Leger (KNIL) memutuskan untuk memasuki BKR dan memanfaatkannya semaksimal mungkin sebagai wahana perjuangannya.

Peran Badan Keamanan Rakyat dan badan-badan perjuangan di bidang politik dan militer sangat besar sekali maknanya bagi bangsa Indonesia. Hal ini terbukti BKR dan para pemuda Indonesia berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan dari Jepang dengan cara perebutan kekuasaan dan perebutan persenjataan dari tenaga Jepang untuk tetap menengakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Secara menyeluruh, disamping itu harus tetap meningkatkan ketahanan nasional Indonesia karena bangsa Belanda akan menjajah bangsa Indonesia lagi. Namun secara gigih Badan Keamanan

Rakyat (BKR), rakyat, dan badan-badan perjuangan berjuang bahu-membahu membela, merebut dan mempertahankan bangsanya untuk tetap berdaulat penuh dan mengupayakan pengakuan dan mempertahankan agar bangsa Jepang dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara menyeluruh.

C. Paradigma



Keterangan :

—————> : Garis Bidang

- - - -> : Garis Variabel